

**ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION AND POVERTY
LEVEL ON ECONOMIC GROWTH IN WEST JAVA***

Oleh :

FITRIANA DEWI SUMARYANA, SE., MBA.



**PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
INSTITUT MANAJEMEN KOPERASI INDONESIA
BANDUNG
2021**

**ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT KEMISKINAN
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT**

***ANALYSIS OF THE EFFECT OF INFLATION AND POVERTY
LEVEL ON ECONOMIC GROWTH IN WEST JAVA***

Oleh :

FITRIANA DEWI SUMARYANA, SE., MBA.

Didokumentasikan

Pada Perpustakaan Ikopin Sebagai Bahan Bacaan Mahasiswa
Program Sarjana dan Madya



Ida Ahadiyah, S.Sos

Kepala Perpustakaan Ikopin

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala berkat rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul **“ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT”**.

Dalam penulisan dan penyusunan makalah ini penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan. Baik dari tata cara penulisan maupun penyusunan makalah ini, namun demikian penulis selalu dan telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan penulis sendiri selama menyusun makalah ini hingga selesai.

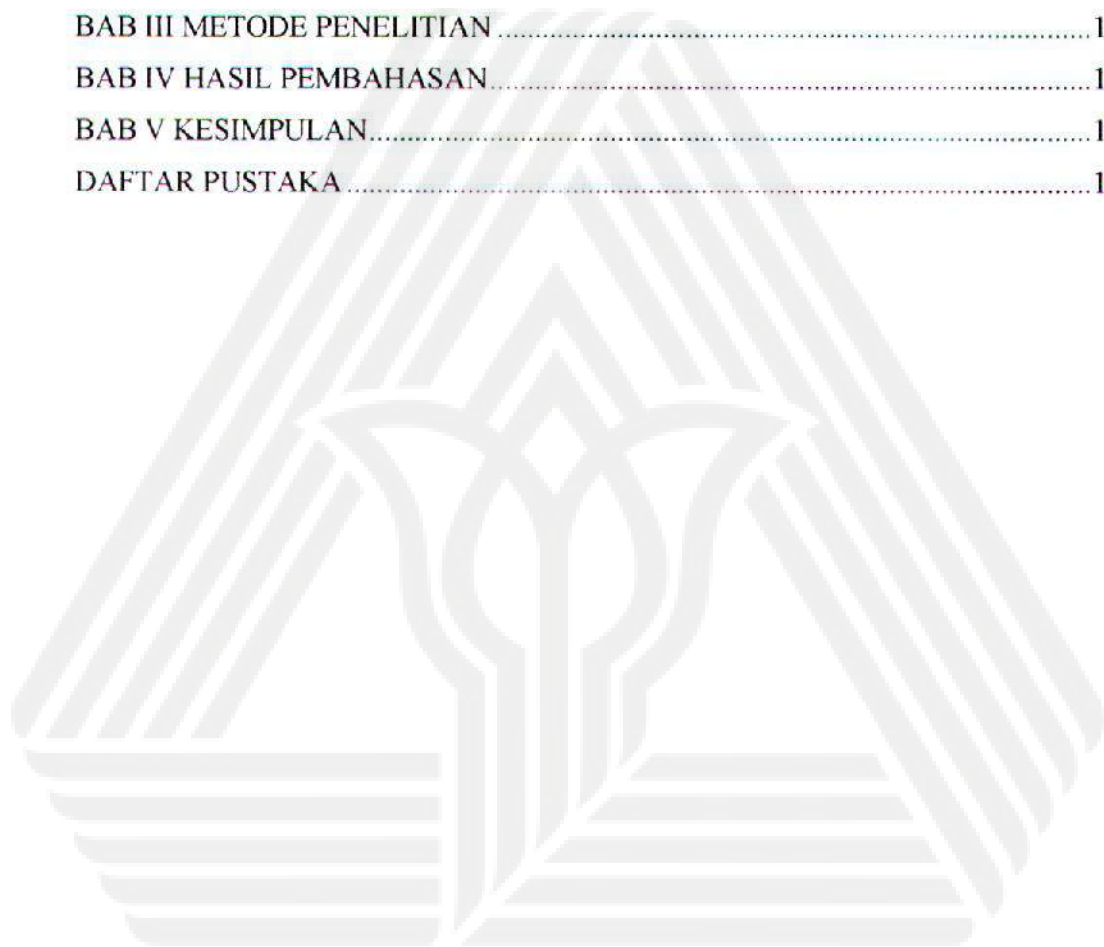
Dalam penyusunan makalah ini, telah banyak pihak yang terlibat baik yang memberi sumbangan pemikiran, dorongan, semangat, kasih sayang serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, penulis yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun, dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Jatinangor, Maret 2021

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
BAB III METODE PENELITIAN.....	12
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	13
BAB V KESIMPULAN.....	17
DAFTAR PUSTAKA.....	18



IKOPIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian terpenting dari kebijakan ekonomi di negara atau sistem ekonomi mana pun. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mengarah pada lebih banyak peluang ekonomi dan keadilan.

Inflasi merupakan faktor makroekonomi yang dapat membawa keuntungan dan kerugian bagi dunia usaha secara bersamaan. Sebagai aturan, pelaku pasar modal tidak menyukai inflasi yang tinggi karena meningkatkan biaya produksi dan operasi perusahaan. Namun di sisi lain, inflasi juga menaikkan harga jual produk suatu perusahaan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan yang optimal, perluasan angkatan kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan secara umum, kita perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Di Jawa Barat, inflasi pada triwulan I tahun 2021 tetap terkendali pada laju tahunan sebesar 1,43% (year-on-year), lebih rendah dari 2,18% (year-on-year) pada triwulan IV 2020. Pada kuartal I 2020 mencapai 3,94% (year-on-year). Rendahnya inflasi pada triwulan I tahun 2021 terkait dengan masih terbatasnya permintaan akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat Jawa Barat (PPKM), di samping pengendalian pasokan pangan oleh tanaman pangan ganda. Berdasarkan kota-kota pembentuk IHK di Jawa Barat, Bekasi merupakan kota dengan tingkat inflasi tertinggi 1,97% year-on-year dan kota Cirebon merupakan kota dengan tingkat inflasi terendah 0,82% year-on-year.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA BARAT”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang akan dianalisis terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang berguna untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inflasi dan tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat berguna bagi pihak perusahaan sejenis. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini akan dapat digunakan oleh pelaku usaha maupun pemerintah sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berarti dalam melakukan kegiatan usahanya.

2) Kegunaan Pengembangan Ilmu

- Kepentingan ilmu pengetahuan, yang mana dalam penelitian ini berusaha semaksimal mungkin melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang terjadi berdasarkan metode ilmiah, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri
- Peneliti sendiri, yang mana kegiatan ini akan menambah wawasan pengetahuan dan daya nalar sebagai bagian dari proses belajar.
- Universitas, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
- Peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Inflasi

Inflasi adalah kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun kita tidak pernah menghendaki. Milton Friedman mengatakan “inflasi bisa terjadi dimana saja dan selalu merupakan fenomena moneter”. Inflasi dianggap fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Ekonom Keynesian meyakini inflasi dapat terjadi secara independen dari kondisi moneter. Jika didefinisikan, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Inflasi terjadi jika terjadi kenaikan harga, bersifat umum, berlangsung secara terus menerus terjadi secara bersamaan. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara tidak bisa dikatakan inflasi.

Penyebab terjadinya inflasi adalah sebagai berikut:

1) Inflasi akibat tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika barang yang diminta (permintaan agregat atau AD) melebihi jumlah barang yang ditawarkan dalam perekonomian (penawaran agregat atau AS). Dengan kata lain, permintaan masyarakat akan produk atau jasa tertentu terus meningkat, sedangkan kapasitasnya tetap atau tidak bisa ditingkatkan. Kapasitas yang lebih rendah dari yang dibutuhkan masyarakat dapat disebabkan oleh dua hal.

Faktor lainnya adalah ketakutan akan peningkatan pendapatan masyarakat atau berlanjutnya kenaikan harga di masa yang akan datang. Meningkatnya

permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih besar daripada barang dan jasa yang ditawarkan dan menyebabkan harga dan inflasi yang lebih tinggi.

2) Inflasi akibat dorongan produksi (*cost push inflation*)

Inflasi desakan biaya atau inflasi dari sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya yang pesat dibandingkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, sehingga perusahaan mengurangi supply barang dan jasa.

2.2 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah individu, bukan masalah kelompok yang disebabkan oleh kelemahan individu atau pilihan hidup. Kemiskinan dapat dihilangkan dengan memperluas kekuatan pasar sebesar-besarnya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar-besarnya. Pengentasan kemiskinan tidak boleh bersifat sementara. Dan itu tidak hanya mempengaruhi keluarga, LSM, atau kelompok agama. Menurut Mudrajat Kuncoro, kemiskinan didefinisikan sebagai tidak memenuhi standar hidup minimum, dan pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan berbasis konsumsi ini terdiri dari dua komponen: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar minimum makanan dan kebutuhan dasar lainnya, (2) jumlah kebutuhan lain yang berbeda secara signifikan, dan biaya partisipasi yang akan dikonfigurasi. Kehidupan manusia mencerminkan kehidupan sehari-hari. Definisi kemiskinan yang paling luas menyebabkan ketidaknyamanan dalam hidup, mengancam penegakan hak dan keadilan, mengancam posisi tawar-menawar (negosiasi) dalam hubungan dunia, kehilangan generasi, dan masa depan yang kelam di hadapan bangsa dan negara. Negara-negara maju yang menekankan “kualitas hidup” yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan tidak akan memperlambat laju pertumbuhan industri, tetapi justru

akan meningkatkan pencemaran udara dan pencemaran air, mempercepat penipisan sumber daya alam. Ini mengurangi kualitas lingkungan. Di sisi lain, bagi negara berkembang, pertumbuhan ekonomi tahun 1960 yang relatif tinggi hanya berdampak kecil terhadap pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Apabila suatu daerah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut telah berhasil mencapai pembangunan ekonomi. Namun pertanyaan dari pembangunan ekonomi ini adalah apakah pertumbuhan ekonomi suatu wilayah merata di antara semua kelas sosial. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

2.3 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2011:331) “pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat”. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Selain itu, angkatan kerja meningkat karena penambahan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan. Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan pendapatan tambahan bagi orang-orang selama periode waktu tertentu. Karena kegiatan ekonomi pada

dasarnya adalah proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk memproduksinya, maka proses ini mengarah pada aliran imbalan atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2010). Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik unsur tersebut dan produksi diharapkan meningkat. Dikatakan tentang pertumbuhan ketika semua pembayaran aktual untuk penggunaan sumber daya dalam satu tahun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi terjadi ketika pendapatan riil suatu negara dalam satu tahun lebih tinggi dari pendapatan riil negara pada tahun sebelumnya.



IKOPIN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data informasi penelitian ini melakukannya dengan metode penelitian online (ORM). Metode penelitian online ini adalah peneliti dimana melakukan pengumpulan data melalui internet. Dan Hasil yang di dapat yaitu memberikan informasi Pertumbuhan Ekonomi pada Triwulan I di Provinsi Jawa Barat. Dan hasil yang di dapat yaitu memberikan informasi tentang pengaruh Inflasi dan tingkat kemiskinan.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Inflasi Jawa Barat Pada Tahun 2020

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) menyebutkan indeks harga gabungan atau IHK Gabungan Jabar yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 106,20 di November 2020 menjadi 106,75 di Desember 2020, dengan demikian terjadi inflasi sebesar 0,52 persen. Dengan laju inflasi tahun 2020 sebesar 2,18 persen.

Dari sebelas kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 1,82 persen; Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,03 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,09 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya sebesar 0,04 persen; dan Kelompok Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,83 persen.

Adapun yang mengalami deflasi yaitu Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,02 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,30 persen. Sedangkan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah; Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan; dan Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga.

Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2020 seluruhnya mengalami inflasi yaitu Kota Bogor sebesar 0,44 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,58 persen; Kota Bandung sebesar 0,39 persen; Kota Cirebon sebesar 0,49 persen; Kota Bekasi sebesar 0,73 persen; Kota Depok sebesar 0,36 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,26 persen. Sementara secara nasional, BPS Pusat mencatat pada Desember 2020, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,45 persen atau naik dari bulan sebelumnya yang

sebesar 0,28 persen. Dengan demikian, inflasi untuk tahun kalender 2020 menjadi sebesar 1,68 persen.

4.2 Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar jumlah penduduk miskin di Jabar turun sekitar 6 orang dari 4,19 juta (8,43%) pada September hingga 2020. Jumlah tersebut meningkat, sebesar 82.000 pada tahun tersebut. Pada Maret 2021, jumlahnya mencapai 4,2 juta (8,40%). Dibandingkan dengan keadaan September 2020 ini ada peningkatan 682.000 jiwa. Dibanding Maret 2020, kenaikan ini sangat penting. Selama periode Maret 2015 hingga September 2019, angka kemiskinan di Jabar menunjukkan tren penurunan jumlah dan proporsi, namun angka kemiskinan di Jabar terus meningkat sejak Maret 2020 hingga September 2020. Dibandingkan September, jumlah penduduk miskin meningkat 6,82 ribu. Namun, dibandingkan dengan situasi pada Maret tahun lalu, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat meningkat sekitar 275.000.

Faktor yang terkait dengan inflasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Maret 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan Ekonomi TW I 2021 terhadap TW III 2020 Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan I-2021 dibandingkan triwulan III-2020 tumbuh sebesar 0,89 persen, walaupun pertumbuhan di kedua triwulan tersebut secara year on year masih berkontraksi
- b) Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Terkontraksi Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Jawa Barat pada triwulan I 2021 dibandingkan triwulan III-2020 tumbuh sebesar 2,21 persen, walaupun pertumbuhan di kedua triwulan tersebut secara year on year masih berkontraksi.
- c) Laju Inflasi Selama periode September 2020 - Maret 2021, angka inflasi umum Jawa Barat tercatat sebesar 1,24 persen.

- d) Perubahan Harga Eceran Beberapa Komoditas Pokok Pada periode September 2020 – Maret 2021, di Jawa Barat harga eceran sebagian besar komoditas pokok mengalami kenaikan antara lain tepung terigu, daging ayam ras, daging sapi, ikan kembung, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit dan minyak goreng. Namun susu kental manis, gula pasir dan juga beras yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap GK mengalami penurunan
- e) Perubahan Persentase Pekerja Setengah Penganggur Pada Februari 2021, Persentase Pekerja Setengah Penganggur di Jawa Barat sebesar 8,59 persen. Terjadi penurunan sebesar 1,72 persen poin dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 10,31 persen.
- f) Perubahan Pekerja Informal Sebanyak 12,13 juta orang (54,37 persen) di Jawa Barat bekerja pada kegiatan informal.

4.3 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2021 melanjutkan perbaikan dengan mencatat kontraksi yang semakin kecil menjadi -0,83% (yoy) dari sebesar -2,39% (yoy) pada triwulan IV 2020. Kondisi ini sejalan dengan perbaikan pada kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -0,74% (yoy) dari sebelumnya -2,19% (yoy) pada triwulan IV 2020 (Grafik 1.1). Kinerja ekonomi Jawa Barat terus menunjukkan perbaikan secara bertahap karena aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat yang diimbangi upaya mencegah penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (*dynamic balancing*).

Secara umum, kawasan Jawa masih memainkan peranan terbesar dalam perekonomian nasional dengan pangsa 58,70% pada triwulan I 2021. Adapun Jawa Barat masih menjadi penopang perekonomian nasional dengan pangsa 13,50%, tertinggi ketiga setelah DKI Jakarta (18,07%) dan Jawa Timur (14,80%). Kondisi ini relatif sama apabila dibandingkan dengan tahun 2020. Pada triwulan I 2021, seluruh provinsi di wilayah Jawa mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan

tertinggi dicatatkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah tumbuh positif. Sementara provinsi lainnya masih tumbuh negatif. Berdasarkan kontribusinya terhadap perekonomian di Pulau Jawa, Jawa Barat berada pada urutan ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap Pulau Jawa sebesar 23%, sementara kontribusi DKI Jakarta sebesar 30,7% dan Jawa Timur sebesar 25,2%. dan pelonggaran kebijakan lockdown di negara tujuan sehingga mendorong kelancaran logistik. Sejalan dengan hal tersebut, impor juga mengalami peningkatan dari -19,53% (yoy) menjadi 12,14% (yoy) terutama untuk bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan perbaikan ekonomi di Jawa Barat.



BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Tahun 2019 Triwulan I Di Provinsi Jawa Barat maka dapat di ambil

kesimpulan yaitu Perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Barat pada triwulan I mengalami fluktuasi yang cenderung tidak stabil, dimana inflasi tertinggi terjadi pada bulan januari 2019 sebesar 0,30%, dan yang terendah pada bulan februari sebesar -0,10%, Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terus mengalami perbaikan. Pada triwulan I 2021 mencatat kontraksi yang semakin kecil yaitu menjadi -0,83%, Kemiskinan yang terjadi di Jawa Barat terejadi karena Perubahan Harga Eceran Beberapa Komoditas Pokok, Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat memberikan kontribusi ekonomi terhadap Pulau Jawa sebesar yaitu 23%.

Untuk saran yang berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan yaitu Untuk menurunkan atau mempertahankan tingkat inflasi agar berada pada tingkat yang telah di tetapkan oleh pemerintah setempat, maka sebaiknya pemerintah setempat selaku pemegang otoritas tertinggi dalam kebijakan moneter, harus menjaga harus menjaga agar harga komoditas pokok lebih stabil lagi sehingga tingkat inflasi yang terjadi akan lebih terkendali, Dan Untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di wilayah Jawa Barat pemerintah setempat dapat menambah lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat mengedukasi Kembali bagi SDM yang ada terutama yang berada di wilayah Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Pertumbuhan Ekonomi,” *Econ. J.*, vol. 10, no. 32, pp. 114–122, 2020.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Pertumbuhan Ekonomi,” *Econ. J.*, vol. 10, no. 32, pp. 114–122, 2020, [Online]. Available: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Juni-2021.aspx#:~:text=Inflasi Jawa Barat pada triwulan,%2C94%25> (yoy).

A. G. A. Krisna and N. G. P. Wirawat (2007). Pengaruh Inflasi. *Jurnal Akuntansi*, vol. 44, no. 1, pp. 48–50, 2007.

Badan Pusat Statistika, “Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat,” *Bank Indones.*, pp. 1–33, 2021, [Online]. Available: www.bi.go.id.

